



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 218/Pdt. P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Wahyuni Ramadhaini Perempuan, lahir di Banda Aceh, Umur 31 tahun, tanggal 29 April 1992, tempat tinggal di Jalan T. Diblang II, No. 50 Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 23 November 2023 dalam Register Nomor 218/Pdt.P/2023/PNBna, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Banda Aceh pada tanggal 16 Maret 2019;
- Bahwa anak pemohon anak ke satu dari pasangan suami isteri Mus Mulyono dan Wahyuni yang melangsungkan pernikahan di Aceh Tengah tanggal 23 Maret 2015;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No.1171-LT-03022020-0004 tertanggal 03 Juli 2023 tertulis anak pemohon dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 16 Maret 2023 laki-laki anak kesatu dari pasangan suami isteri Musmulyono dan Wahyuni Ramadhani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan/penggantian nama Syahrul Mulyadi pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana di dalam akta tertulis Syahrul Mulyadi diganti menjadi Diansyah Umaiya Putra;
- Bahwa pengantian nama Syahrul Mulyadi yang terdapat dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin diganti pemohon menjadi Diansyah Umaiya Putra;
- Bahwa pengantian nama Syahrul Mulyadi yang tertulis pada akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan dan tidak cocok jika nama tersebut dipanggil ke anak pemohon;

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pergantian nama Syahrul Mulyadi yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banda Aceh telah mengeluarkan akta kelahiran No.1171-LT-03022020-0064 tertanggal 03 Juli 2023;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Syahrul Mulyadi pada akta kelahiran anak Pemohon No.1171-LT-03022020-0064 dari Syahrul Mulyadi menjadi Diansyah Umaiya Putra;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1171026904920001, tanggal 21 Februari 2023 atas nama Wahyuni Ramadhani, diberimaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1171021110160001, tanggal 21 Februari 2023, atas nama Kepala Keluarga M. Reza Pratama, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syahrul Mulyadi Nomor 1171-LT-03022020-0004, tanggal 3 Juli 2020, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberitanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta CeraI, Nomor 181/AC/202/MS.Bna, tanggal 13 Agustus

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atas nama Musmulyono dan Wahyuni Ramadhani diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberitanda P-4;

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat-surat dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Zulaikha AR dan 2. Sutina Aini, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut dibawah ini:

1. Saksi Zulaikha AR.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon bernama Wahyuni Ramadhani lahir di banda Aceh pada tanggal 29 April Tahun 1992;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon yang bernama Syahrul Mulyadi;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Nomor 1171-LT-03022020-0004, tanggal 3 Juli 2023 Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon tertulis Syahrul Mulyadi yang seharusnya Diansyah Umaiya Putra ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki penulisan nama anak pada Akta kelahiran anak Pemohon tersebut dimana di dalam akta nama anak Pemohon tertulis Syahrul Mulyadi yang seharusnya Diansyah Umaiya Putra
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangannya benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Mutiarti Satriana;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon bernama Wahyuni Ramadhani lahir di banda Aceh pada tanggal 29 April Tahun 1992;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon yang bernama Syahrul Mulyadi;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Nomor 1171-LT-03022020-0004, tanggal 3 Juli 2023 Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon tertulis Syahrul Mulyadi yang seharusnya Diansyah Umaiya Putra ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki penulisan nama anak pada Akta kelahiran anak Pemohon tersebut dimana di dalam akta nama anak Pemohon tertulis Syahrul Mulyadi yang seharusnya Diansyah Umaiya Putra;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangannya benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 2 (dua) yaitu: Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama pada akta kelahiran Pemohon Nomor 1171-LT-03022020-0004, tanggal 3 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, dari Syahrul Mulyadi diganti menjadi Diansyah Umaiya Putra;

Menimbang, bahwa mengenai perbaikan nama atau data pada Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5, serta saksi-saksi Zulaikha AR dan Sustina Aini, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon sendiri, maka diketahui Pemohon yang bernama Keumala Sari merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Meulaboh, pada tanggal 26 April 1974 dan beralamat di Jalan T. Diblang II, No. 50 Desa Rukoh, Kecamatan

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syiah Kuala kota Banda Aceh (Vide. Bukti P-1, P-2,), dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dengan demikian Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya, Hakim menilai haruslah dipertimbangkan dahulu Petitum poin ke-2 (dua) mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama anak Pemohon dari nama Syahrul Mulyadi seharusnya Diansyah Umaiya Putra, karena Petitum poin ke-2 (dua) merupakan dasar dari petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan penggantian nama anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas dapat dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama dapat dikategorikan termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama adalah Hak setiap Warga Negara, meski demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang bagaimana prosedur untuk melakukan perubahan nama, tanpa memberi petunjuk lebih lanjut mengenai alasan apa yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan nama tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat jika maksud pembentuk Undang-Undang hendak memberikan kebebasan kepada setiap Pemohon untuk secara leluasa mencantumkan alasan tertentu dalam setiap perubahan nama berdasarkan situasi dan kondisi aktual yang benar-benar dihadapi oleh Pemohon, sedangkan mengenai beralasan atau tidaknya suatu alasan permohonan yang diajukan, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan dan penilaian Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa meski demikian Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama tersebut tidak boleh sampai melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan dan penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan ayah Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;

3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum atau untuk melakukan suatu penyeludupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Saksi Zulaikha AR dan Sustina Aini dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, didapati fakta bahwa nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Bernama Syahrul Mulyadi, selanjutnya Pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon tersebut dengan nama Syahrul Mulyadi menjadi Diansyah Umaiya Putra;

Menimbang, bahwa pengubahan/memperbaiki nama anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan bukanlah untuk menyelundupkan hukum, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon Bernama Syahrul Mulyadi apabila diubah menjadi Diansyah Umaiya Putra tidak melanggar adat istiadat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar atau norma kesusilaan atau nilai yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sertadibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga Pemohon diberi izin untuk memperbaiki nama anak Pemohon Bernama Syahrul Mulyadi, selanjutnya Pemohon berkeinginan mengganti nama tersebut diganti dengan nama Diansyah Umaiya Putra ;

Menimbang, bahwa karena petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh yang merupakan Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon. Selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh yang merupakan Pejabat Pencatatan Sipil, membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama anak Pemohon dari Syahrul Mulyadi dan selanjutnya Pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon tersebut dengan nama Syahrul Mulyadi menjadi Diansyah Umaiya Putra sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1171-LT-03022020-0004, tanggal 3 Juli 2023, sehingga terhadap petitum poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum poin ke-4(empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada poin ke-2 (dua) sampai dengan poin ke-4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan poin ke-1(satu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M ENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Syahrul Mulyadi pada akta kelahiran anak Pemohon No.1171-LT-03022020-0064 dari Syahrul Mulyadi menjadi Diansyah Umaiya Putra;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp135.000.00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Kami, H.M. Yusuf,S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh Yusnidar, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusnidar,, S.H.

H.M. Yusuf,S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran (PNBP) :Rp.30.000,00

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 2. Biaya ATK | :Rp.75.000,00. |
| 3. Biaya PNPB Relas | :Rp.10.000,00 |
| 4. Biaya Materai | :Rp.10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : <u>Rp.10.000,00</u> |

Jumlah..... Rp.135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);